



LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL DAERAH

EDISI
XLIX
SEPT
2025



Peran TKD dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Tipologi Resiliensi Daerah: Analisis *Recursive* dan Pemetaan Kebijakan

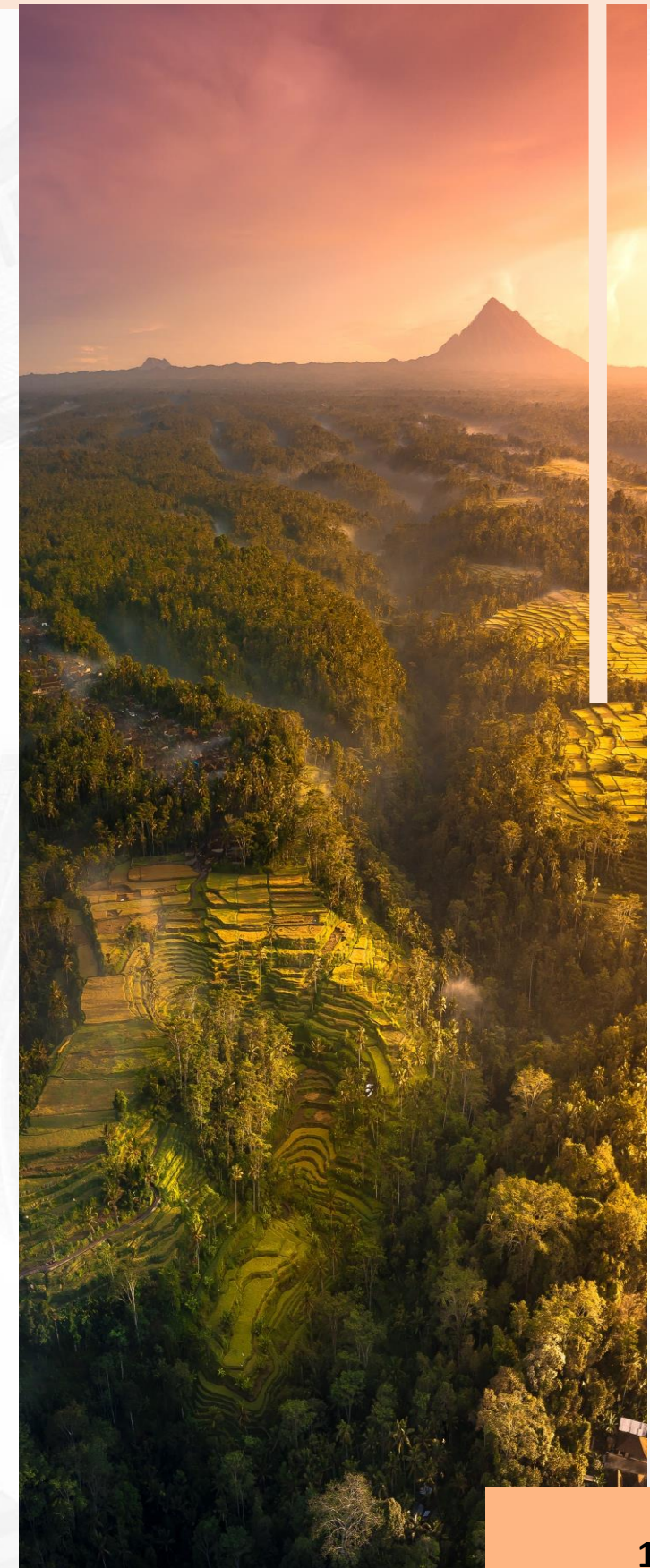
Latar Belakang

Desentralisasi Fiskal di Indonesia telah membuka ruang bagi daerah untuk lebih berperan dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia demi mencapai target pembangunan termasuk pertumbuhan ekonomi yang optimal selaras dengan potensi dan karakteristik lokal. Dana Transfer ke Daerah (TKD) menjadi instrumen yang penting untuk menjembatani ketimpangan fiskal antar wilayah sekaligus mendukung pelayanan publik yang baik dan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun, efektifitas TKD dalam mencapai hal tersebut tidaklah mudah dan cenderung beragam, dimana hal ini terlihat dari kinerja perekonomian daerah yang bervariasi (Farida., et.al, 2021; Yuliana et al., 2025). Variasi struktur ekonomi, kapasitas fiskal serta kerentanan daerah terhadap risiko bencana diduga menjadikan respon daerah terhadap TKD berbeda-beda sehingga kebijakan TKD yang “one size fits all” ditengarai tidak relevan dan kontraproduktif.

Studi Bappenas tahun 2019 tentang Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia menyatakan bahwa 1% kenaikan TKD dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 0.016% daerah. Selaras dengan studi tersebut, kajian DJPK tahun 2023 juga menemukan bahwa pengaruh transfer ke daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal bervariasi antar wilayah

Hal tersebut mengindikasikan bahwa dampak TKD masih perlu terus dioptimalkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dikaji lebih dalam bagaimana TKD dapat lebih produktif dan efektif dalam mempengaruhi perekonomian daerah. Oleh karena itu, untuk menghindari one size fits all kebijakan TKD, pemerintah perlu memetakan daerah berdasarkan kinerja stimulus TKD selama ini beserta kondisi resiliensi daerah. Hal ini selaras dengan rekomendasi dari studi World Bank (2019) dan Brodjonegoro & Martinez-Vasquez (2005), maupun studi terbaru dari Yuliana et al., (2025) yang mendorong adanya pemetaan dan klasifikasi daerah agar TKD semakin efektif dan lebih tepat sasaran.

Meskipun berbagai studi sebelumnya telah menganalisis efektivitas transfer ke daerah (TKD) terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagian besar penelitian masih bersifat parsial, misalnya dengan menyoroti periode krisis (Yuliana et al., 2025), ketimpangan antarwilayah (Martinez-Vazquez & Brodjonegoro, 2005), efektivitas belanja daerah (Fatmawati et al., 2022), ataupun peran akuntabilitas fiskal (Bakri et al., 2021). Hasil-hasil tersebut konsisten menunjukkan bahwa dampak TKD tidak seragam antar daerah, namun belum banyak kajian yang menggabungkan dimensi **stimulus ekonomi** dengan **resiliensi daerah**. Padahal, rekomendasi dari World Bank (2019), ADB (2021), dan OECD (2020) menekankan pentingnya pemetaan tipologi daerah untuk merancang kebijakan transfer yang lebih adaptif dan tidak bersifat *one size fits all*.





Oleh karena itu, LPEFD kali ini menghadirkan kebaruan dengan membangun **tipologi efektivitas TKD** yang tidak hanya mempertimbangkan besarnya kontribusi TKD terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tingkat resiliensi daerah yang diukur dari kerentanan bencana dan kapasitas fiskalnya. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam merumuskan strategi optimalisasi TKD sesuai karakteristik masing-masing daerah. Tipologi daerah tersebut akan mengintegrasikan dimensi pertumbuhan dengan resiliensi fiskal. Dimensi pertumbuhan yang dinilai adalah bentuk respon pertumbuhan ekonomi daerah terhadap intervensi pemerintah ketika TKD ditingkatkan 10%. Sedangkan dimensi resiliensi fiskal menggunakan rasio kapasitas fiskal daerah dan indeks risiko bencana yang mengukur kerentanan terhadap gundangan eksternal. Pendekatan resiliensi ini penting karena bisa jadi terdapat daerah yang kurang perform dalam mengoptimalisasikan TKD nya karena daerah tersebut rentan bencana maupun secara umum kapasitas fiskalnya terbatas.

Dengan memahami kombinasi kedua variabel dimensi pertumbuhan dan resiliensi maka dapat ditentukan kategori daerah yang membutuhkan strategi intervensi fiskal berbeda dalam pengelolaan TKD.

Maksud dan Tujuan

Tujuan utama dari kajian pemantauan ekonomi fiskal daerah ini adalah melakukan klasifikasi tipologi daerah berdasarkan dua dimensi penting, yaitu besaran stimulus TKD terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat resiliensi daerah. Dengan pendekatan ini, kajian diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategi intervensi yang lebih tepat sasaran, sehingga peran TKD tidak hanya optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mampu memperkuat keberlanjutan ekonomi daerah melalui peningkatan kapasitas fiskal dan ketahanan terhadap risiko bencana.

Urgensi kajian ini semakin mengemuka ketika mempertimbangkan bahwa perekonomian nasional maupun daerah saat ini menghadapi tekanan eksternal yang semakin kompleks, seperti potensi krisis global, fluktuasi harga komoditas yang memengaruhi basis ekonomi daerah, serta dinamika geopolitik yang dapat mengganggu stabilitas fiskal dan perdagangan. Oleh karena itu, kerangka tipologi ini dapat menjadi landasan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan desain TKD yang lebih adaptif, responsif, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Studi Literatur dan Metodologi

Berbagai teori ekonomi dan beberapa referensi akademis yang tervalidasi telah mendasari penelitian ini. Contohnya adalah Teori Oates (1972) yang telah memposisikan transfer fiskal ke daerah menjadi tools sentral untuk tujuan pemerataan layanan di suatu negara. Studi kasus IDB (2025) terbaru mengungkap fenomena satu persen peningkatan transfer dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal sebesar lebih dari 1.2% lewat meningkatnya konsumsi di Ekuador. Selain itu, Mikhaylova et al., (2018) juga mendapati hal yang mirip ketika dana transfer pemerintah pusat Rusia mendorong sektor prioritas tertentu yang berhubungan dengan pelayanan publik.



Dalam konteks Indonesia, studi domestik juga mendukung pentingnya transfer fiskal namun menyoroti tantangan variasi efektivitasnya. Brodjonegoro dan Martinez-Vazquez (2005) menggarisbawahi bahwa desain TKD di Indonesia belum sepenuhnya memperhatikan variasi kapasitas fiskal antardaerah, sehingga fungsi redistribusi masih terbatas. Kajian Kemenkeu, Bappenas, dan Hamzah (2008) juga menegaskan bahwa seluruh jenis transfer seperti DAU, DAK, DBH, Dana Desa, serta PAD, memiliki kontribusi positif bagi layanan dasar dan pertumbuhan, tetapi efektivitasnya bervariasi. Studi terbaru oleh Yuliana et al. (2025) selama pandemi COVID-19 bahkan menemukan bahwa meskipun transfer fiskal terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, proporsi variasi pertumbuhan yang dijelaskan oleh transfer relatif kecil, sehingga faktor lain seperti kapasitas fiskal dan kerentanan eksternal tetap dominan.

Sejalan dengan itu, dimensi resiliensi daerah juga semakin mendapat perhatian dalam kajian pembangunan. UNDP (2022) misalnya, mengintegrasikan indeks risiko bencana dengan kapasitas fiskal daerah untuk membangun indikator resiliensi, sebagai upaya menilai ketahanan suatu wilayah terhadap guncangan eksternal. Pendekatan ini sejalan dengan upaya Indonesia dalam memperkuat *mainstreaming* adaptasi iklim dan manajemen risiko keuangan publik.

Berdasarkan literatur tersebut, kajian ringkas ini mengadopsi model ekonomi yang bersifat rekursif untuk menganalisis efektivitas marginal dari berbagai jenis TKD yakni DAU, DBH, DAK Non Fisik, dan Dana Desa terhadap pertumbuhan ekonomi. Model rekursif dipilih karena sesuai dengan sifat aliran kebijakan fiskal dari pusat ke daerah yang pada dasarnya satu arah dimana **TKD memengaruhi perilaku belanja daerah, belanja daerah kemudian mempengaruhi melalui kanal konsumsi dan investasi berdampak pada pertumbuhan ekonomi**. Melalui model ini, dapat diidentifikasi jalur kausalitas yang jelas mulai dari TKD → belanja daerah → konsumsi/investasi → pertumbuhan ekonomi, tanpa umpan balik langsung (*no feedback loop*).

Secara umum, hubungan model rekursif yang dapat dibangun adalah sebagai berikut:

1. Persamaan Belanja Modal

TKD memengaruhi besarnya belanja modal

$$BM_{it} = \alpha_0 + \alpha_1dau_{it} + \alpha_2dakf_{it} + \alpha_3dbh_{it} + \alpha_4danadesa_{it} + \alpha_5tkdlain_{it} + \alpha_6pad_{it} + \alpha_5z_{it} + u_{1it}$$

2. Persamaan Belanja Non-Modal

TKD memengaruhi besarnya belanja nonmodal

$$BNM_{it} = \beta_0 + \beta_1dau_{it} + \beta_2daknf_{it} + \beta_3dbh_{it} + \beta_4danadesa_{it} + \beta_5tkdlain_{it} + \beta_6pad_{it} + \beta_5z_{it} + u_{2it}$$

3. Persamaan Konsumsi Rumah Tangga

Belanja nonmodal, belanja K/L, dan PAD berperan menjaga daya beli rumah tangga

$$C_{it} = \gamma_0 + \gamma_1BNM_{it} + \gamma_2belanjaKL_{it} + \gamma_4z_{it} + u_{3it}$$

4. Persamaan Investasi (PMTB)

Belanja moda, belanja K/L dan PAD mendorong akumulasi modal PMTB

$$I_{it} = \delta_0 + \delta_1BM_{it} + \delta_2belanjaKL_{it} + \delta_4z_{it} + u_{4it}$$

5. Persamaan Pertumbuhan Ekonomi

Konsumsi, investasi, dan komponen PDRB lainnya menjadi motor pertumbuhan.

$$gPDRB_{it} = \theta_0 + \theta_1C_{it} + \theta_2I_{it} + \theta_3PDRB\ lain_{it}$$

Catatan : Untuk Persamaan 1 sampai 4, PAD dan variabel kontrol lain z_{it} (jumlah penduduk dan IKK) sebagai determinan tambahan.



Dalam mengimplementasikan model-model tersebut, kajian ini dapat menangkap hubungan kausalitas yang lebih realistis, dimana aliran TKD dari pusat ke daerah bersifat hierarkis dan mampu memahami **efektivitas marginal dari setiap jenis TKD** terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika misalnya DAK Fisik dapat meningkatkan pertumbuhan lewat investasi terbukti lebih kuat dibanding stimulus DAU dalam meningkatkan pertumbuhan, maka kebijakan *rebalancing* TKD dapat diarahkan, misalnya melalui penguatan DAU SG agar lebih menyasar kepada problematika utama kinerja layanan daerah.

Lebih lanjut, integrasi faktor **resiliensi daerah** menambahkan dimensi baru dalam analisis, karena tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal dan ketahanan yang sama dalam menghadapi guncangan eksternal. Dengan demikian, hasil kajian ini tidak hanya membedakan besarnya pengaruh TKD terhadap pertumbuhan, tetapi juga mengidentifikasi kebutuhan kanal intervensi yang berbeda bagi daerah rawan bencana atau berkapasitas fiskal rendah. Pendekatan ini selaras dengan praktik internasional yang menekankan pentingnya *risk-informed fiscal transfer* (World Bank, 2021; UNDP, 2022), dimana desain transfer fiskal harus mempertimbangkan risiko sistemik yang dapat mengganggu kesinambungan pertumbuhan jangka panjang.

Secara praktis, manfaat dari model ini bagi pemerintah antara lain:

1. **Dasar perumusan kebijakan yang terdiferensiasi** – setiap daerah dapat diberikan strategi intervensi TKD yang sesuai dengan tipologi ekonominya (misalnya, fokus infrastruktur untuk daerah elastisitas tinggi-resiliensi rendah, atau penguatan fiskal untuk daerah elastisitas rendah-resiliensi tinggi).
2. **Instrumen *early warning fiskal*** – hasil tipologi dapat digunakan untuk memantau daerah yang rentan stagnasi pertumbuhan ketika menghadapi guncangan global atau bencana, sehingga respons kebijakan dapat lebih cepat.
3. **Penguatan efektivitas belanja publik** – dengan memahami kanal mana yang lebih produktif (konsumsi atau investasi), pemerintah pusat dapat mengarahkan TKD agar benar-benar mendorong akselerasi pertumbuhan.
4. **Mendukung perencanaan jangka menengah** – peta tipologi daerah berbasis resiliensi dan elastisitas pertumbuhan dapat menjadi referensi penting bagi dalam menyusun prioritas pembangunan wilayah.

Kajian ini mengambil sampel Kabupaten/Kota sebanyak 416 kabupaten dan 98 kota dengan total 514 sampel dengan periode 2021-2024. Sumber data diambil dari institusi statistik yang diakui seperti BPS, BNKB. Kami juga menggunakan data dari Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk variabel yang bersifat belanja daerah atau belanja K/L yang digunakan untuk pembangunan.

Penentuan Elastisitas Stimulus TKD per Provinsi

Hasil regresi rekursif memberikan koefisien estimasi hubungan antarvariabel, mulai dari pengaruh TKD terhadap belanja modal dan nonmodal, konsumsi, investasi, hingga pertumbuhan ekonomi. Dari koefisien inilah diturunkan ukuran elastisitas, yaitu seberapa besar respon pertumbuhan ekonomi daerah ketika terjadi perubahan pada TKD. Dalam kajian ini digunakan *shock* berupa simulasi peningkatan TKD sebesar 10 persen sebagai ilustrasi praktis sensitivitas perekonomian daerah terhadap kebijakan fiskal pusat.

Secara teknis, langkah-langkah penentuan elastisitas stimulus tersebut meliputi: (i) estimasi persamaan rekursif berbasis data panel kabupaten/kota (514 sampel, periode 2021–2024), (ii) penarikan koefisien hasil regresi untuk setiap kanal pengaruh (misalnya DBH → Belanja Modal → PMTB → Pertumbuhan), (iii) penerapan simulasi shock +10% TKD untuk menghitung perubahan output PDRB, dan (iv) perhitungan elastisitas provinsi yang menggambarkan persentase perubahan PDRB terhadap persentase perubahan TKD.

Dengan demikian, stimulus per provinsi bukanlah angka asumsi mentah, melainkan hasil integrasi dari koefisien regresi, simulasi intervensi kebijakan, dan agregasi rata-rata respon kabupaten/kota dalam provinsi tersebut. Nilai elastisitas inilah yang kemudian dipadukan dengan Indeks Resiliensi Daerah (IRD) untuk menghasilkan klasifikasi tipologi daerah ke dalam empat kuadran.

Penghitungan Tingkat Resiliensi Daerah

Kemudian, dalam membuat tipologi daerah yang berkaitan dengan resiliensi daerah, kajian ini menggunakan pendekatan IRFF (Insurance & Risk Finance Facility) dari UNDP (2022) yang mengintegrasikan risiko bencana & adaptasi iklim dalam perencanaan dan *financing*.

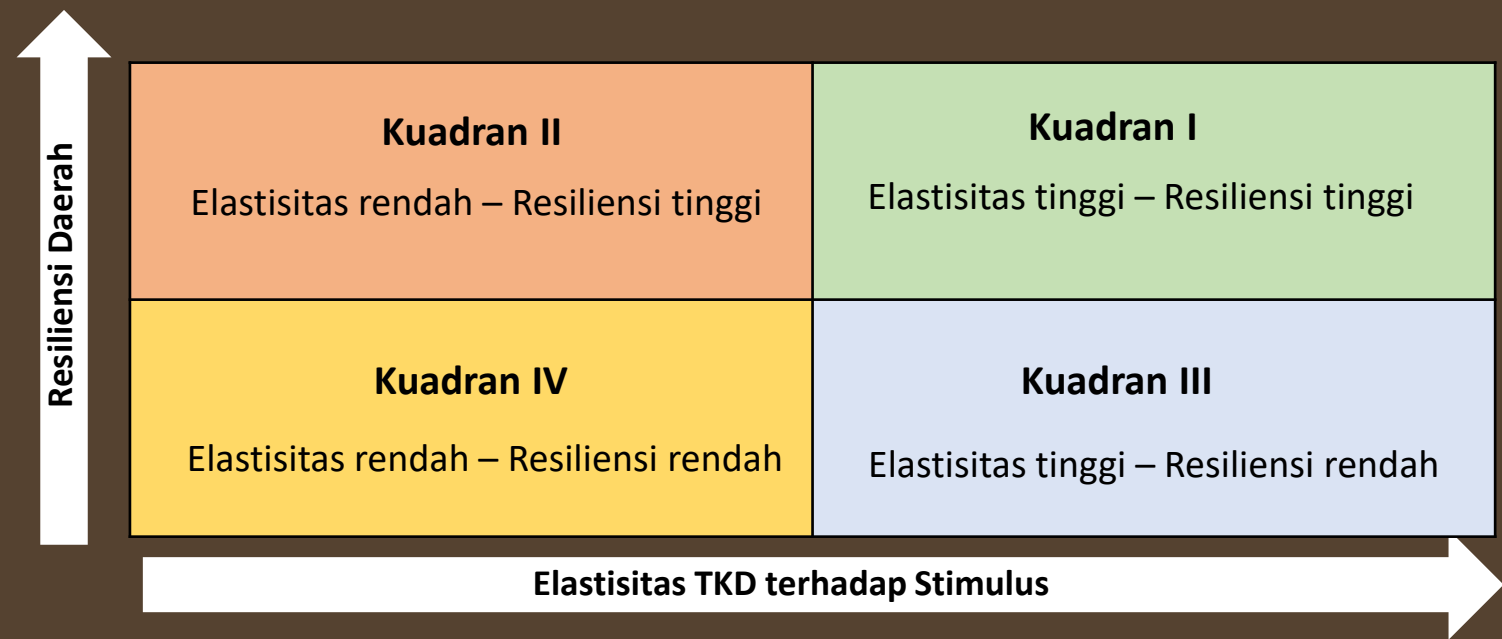
$$IRD_{i,t} = \omega_1 \times \text{Indeks Risiko Bencana}_{i,t} + \omega_2 \times \text{Rasio Kapasitas Fiskal}_{i,t}$$

di mana $\omega_1 + \omega_2 = 1$, $\omega_1, \omega_2 > 0$ | **Bobot:** $\omega_1 = 0,6$ dan $\omega_2 = 0,4$

Pemetaan Tipologi Resiliensi Daerah

Tipologi Resiliensi Daerah

Tahap finalisasi tipologi daerah akan menghubungkan hasil elastisitas stimulus tkd terhadap pertumbuhan ekonomi yang didapatkan melalui regresi rekursif dengan Indeks Resiliensi Daerah sehingga akan didapatkan peta spasial dengan kuadran setiap provinsi yang memiliki klasifikasi sebagai berikut



Analisis dan Pembahasan

Setelah dilakukan model regresi rekursif dan dilakukan simulasi kenaikan semua jenis TKD sebanyak 10% untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka ditemukan beberapa hal sebagai berikut;

1. PMTB atau investasi merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah melalui jenis TKD (DBH dan DAK Fisik). Sementara DAU teridentifikasi belum signifikan meningkatkan belanja modal (Capex). Hal ini disebabkan DAU dengan fungsi utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah lebih banyak didominasi oleh belanja rutin (lihat Tabel 1)
2. TKD yang bersifat rutin seperti DAU, DAK non fisik, dan Dana Desa menopang konsumsi sehingga menstimulus pertumbuhan di sisi demand. DAU yang dominasi alokasinya belanja pegawai dan operasional akan langsung masuk ke pendapatan rumah tangga dan digunakan untuk konsumsi. DAK non fisik seperti dana BOS, dan BOK akan mengurangi beban rumah tangga (belanja operasional Pendidikan dan kesehatan) sehingga ruang konsumsi juga meningkat. Sedangkan Dana Desa lebih banyak direalisasikan untuk belanja padat karya, BLT desa dan operasional desa yang akan meningkatkan likuiditas rumah tangga desa yang utamanya digunakan untuk kebutuhan pokok dan pangan. (lihat tabel 1)
3. PAD secara signifikan mempengaruhi perekonomian melalui belanja belanja modal dan non modal. Namun pengaruh PAD lebih kuat terhadap pertumbuhan ekonomi lewat chanel investasi dibandingkan konsumsi. Hal ini disebabkan PAD (pajak daerah, retribusi, hasil BUMD, dll.) memberikan fleksibilitas fiskal yang lebih besar dibanding TKD karena penggunaannya tidak bergantung pada earmarking. Belanja modal dari PAD (misalnya membangun jalan, rumah sakit, sekolah) baru berdampak ke produktivitas dan output ekonomi setelah beberapa tahun. Sebagian besar provinsi memiliki kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah yang cukup kecil (dibawah 20%) sehingga dengan basis PAD yang kecil, dampak terhadap perekonomian secara agregat juga terbatas. (lihat Tabel 2)



Tabel 1 Hasil Regresi Analisis 1 dan 2

Komponen TKD	Hasil Utama (Elastisitas ke PDRB)	Pendukung Jalur Konsumsi	Pendukung Jalur PMTB	Simulasi TKD ↑10% ⇒ %ΔPDRB	Interpretasi
DBH ***	0.122	0.015	0.107	1.22	Pengaruh terbesar dan dominan lewat PMTB; sinyal kuat bahwa peningkatan DBH menaikkan investasi dan output daerah.
DAK Fisik ***	0.047	0	0.047	0.47	Positif dan signifikan melalui PMTB; sesuai fungsi DAK Fisik yang menambah aset infrastruktur produktif.
DAU ns	0.029	0.008	0.021	0.295	Positif kecil; terutama lewat PMTB, menunjukkan sebagian DAU ikut menopang belanja modal meski fungsi utamanya pendukung layanan dasar.
DAK Non-Fisik ***	0.01	0.01	0	0.104	Efek total sangat kecil karena hanya masuk via konsumsi; tidak berdampak ke investasi.
Dana Desa ***	0.027	0.027	0	0.266	Dana Desa memperkuat daya beli masyarakat untuk belanja non modal untuk konsumsi dan layanan dasar sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi
PAD***	0.158	0.032	0.126	1.582	Efek dalam mengungkit investasi dan belanja rutin dengan efek total lebih besar
Keterangan : *** signifikan dengan alpha 0.001, tidak ada tanda Bintang artinya tidak signifikan					

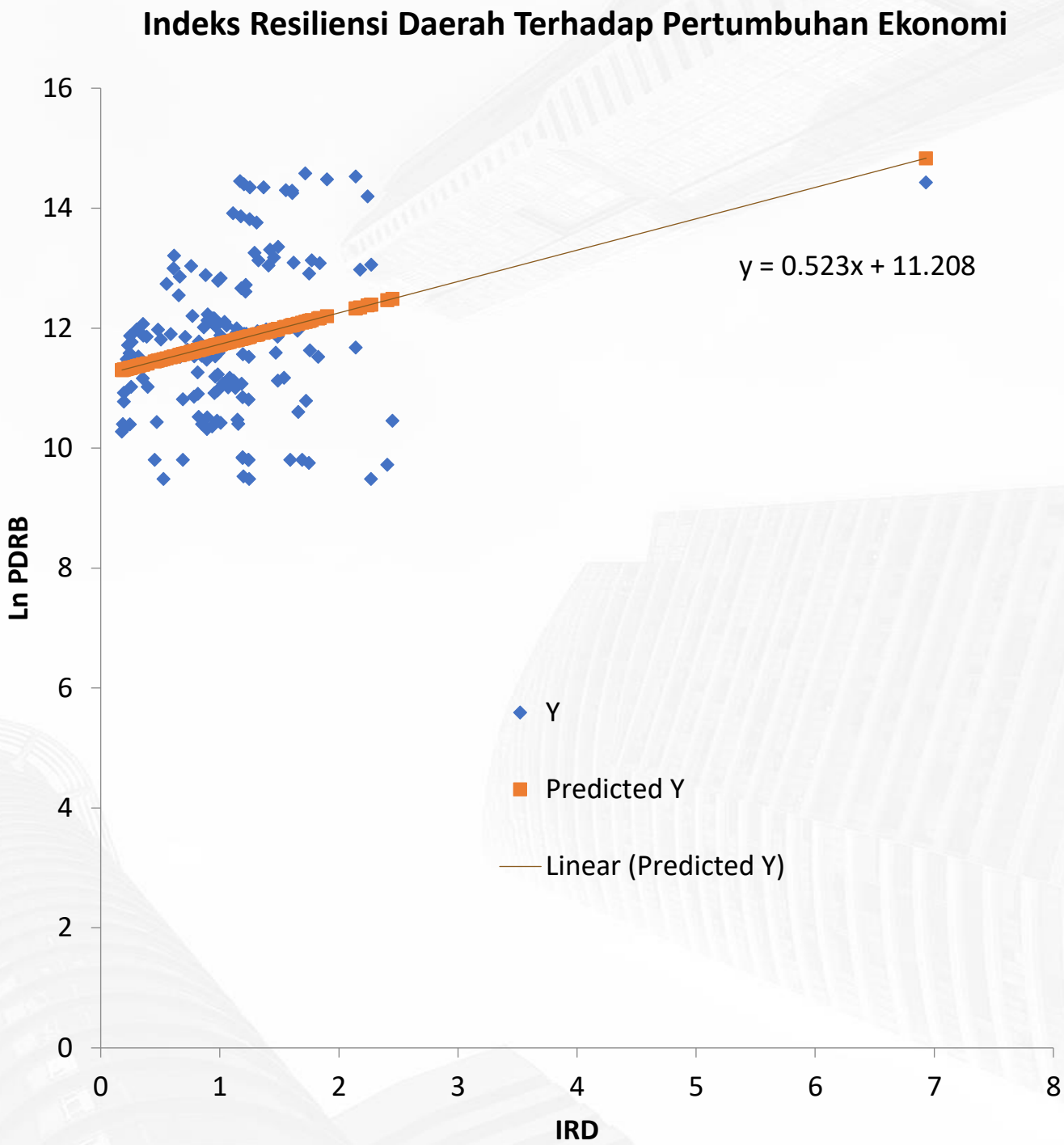
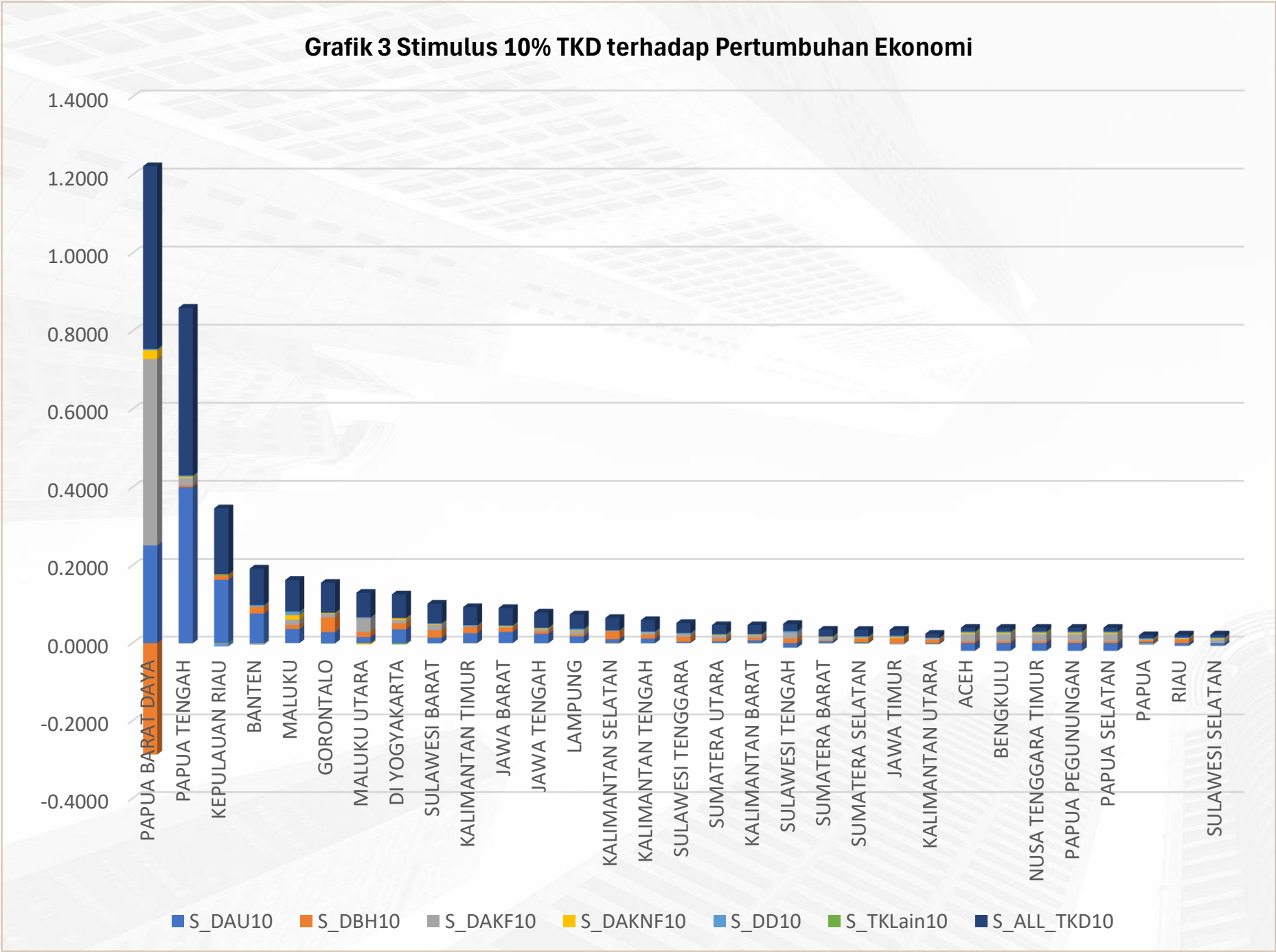
Tabel 2 Hasil Regresi Analisis 3

Faktor	Efek ke Konsumsi (β)	Efek ke PMTB (β, total)	Ke PDRB via Konsumsi	Ke PDRB via PMTB	Elastisitas Total → PDRB	Proporsi via PMTB	Makna & Implikasi singkat
PAD	0.194 *** ¹	0.585 *** ²	0.080	0.273	0.353	77.4%	PAD secara statistik signifikan menaikkan PDRB terutama melalui investasi/PMTB. Diharapkan PAD dapat dialokasikan untuk belanja modal produktif sehingga dapat akselerasi pertumbuhan

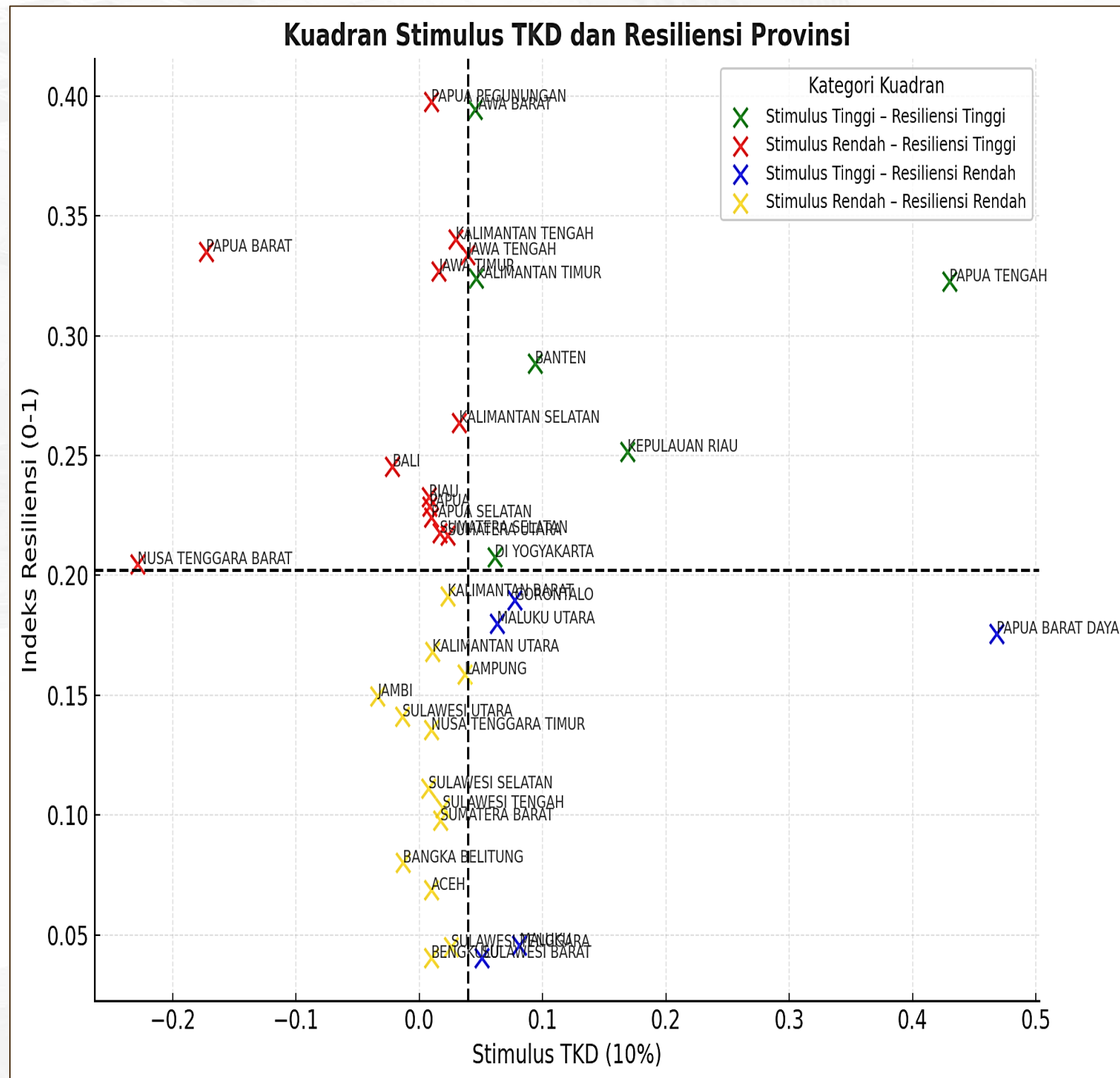
4. Secara umum stimulus jenis TKD paling besar di setiap provinsi adalah melalui jalur DBH dan DAK Fisik yang sifatnya mendorong investasi. Namun, kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik dari komposisi APBD per provinsi. Misalnya jika APBD provinsi tersebut memiliki share belanja modal lebih besar maka TKD seperti DAK Fisik dan DBH yang menstimulus melalui PMTB akan berdampak kuat terhadap pertumbuhan. Sebaliknya jika APBD provinsi lebih banyak share ke belanja non modal, maka TKD rutin seperti DAK non fisik, dana desa dan DAU akan memberikan efek pertumbuhan lebih banyak dengan kanal konsumsi. Hasil stimulus per komponen TKD memberikan peluang *rebalancing* TKD untuk memaksimalkan kanal yang paling efektif menstimulus pertumbuhan per provinsi. (Lihat Grafik 3)



Kemudian, hasil elastisitas stimulus TKD tersebut dirata-ratakan dan disandingkan dengan hasil resiliensi daerah sehingga didapat peta spasial dengan 4 kuadran. Hasil resiliensi daerah didapatkan melalui integrasi variabel Indeks Risiko Bencana dengan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah dengan bobot masing-masing 0.6 dan 0.4. Kemudian indeks resiliensi dikorelasikan dengan pertumbuhan ekonomi untuk kebutuhan validitas instrumen



Grafik 4



Dari hasil korelasi indeks resiliensi terhadap pertumbuhan ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa semakin resilien daerah maka semakin besar kemungkinan pertumbuhan ekonomi dapat terakselerasi. Sebaliknya semakin tidak resilien suatu daerah, maka risiko terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi lebih besar terjadi.

Kemudian, jika dilihat dari perspektif kuadran hasil stimulus TKD terhadap pertumbuhan ekonomi maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Kuadran I: Elastisitas TKD Tinggi dan IRD Tinggi (Hijau)

- **Contoh: Banten, DIYogyakarta, Jawa Barat, Kaltim, Kepri**
- Fokus kepada *Growth Accelleration*: TKD dapat diarahkan untuk transformasi ekonomi, hilirisasi industri hijau dan pengolahan serta pelatihan digitalisasi marketing produk yang berfokus pada nilai tambah
- Fokus pada belanja produktif sehingga terdapat quality spending dari alokasi TKD yang tinggi

2. Kuadran II: Elastisitas TKD Rendah dan IRD Tinggi (Merah)

- Contoh: Bali, Jateng, Jatim, Kalsel, Kalteng, NTB.
- *Daerah relative tahan risiko namun stimulus TKD kurang efektif mendorong pertumbuhan*
- *Perlunya policy rebalancing*: perkuat DAU berbasis kinerja layanan publik, arahkan DAK ke sektor inovasi & SDM agar TKD lebih produktif, tingkatkan kapasitas manajerial daerah.

3. Kuadran III: Elastisitas TKD Tinggi dan IRD Rendah (Biru)

- **Contoh: Gorontalo, Maluku, Malut, Papua Barat Daya Sulbar**
- Daerah cepat tumbuh dengan TKD, tetapi rentan terhadap guncangan eksternal (bencana/kapasitas fiskal lemah)
- Kombinasi *growth stimulus* + *risk mitigation*: perkuat TKD berbasis *contingency fund*, dukung adaptasi iklim & perlindungan sosial agar pertumbuhan lebih berkelanjutan.

4. Kuadran IV: Elastisitas TKD Rendah dan IKE Rendah (Kuning)

- **Contoh: Aceh, Babel, Bengkulu, Jambi, Kalbar.**
- Daerah Rentan sekaligus TKD tidak responsif
- Prioritas intervensi komprehensif: kombinasi peningkatan kapasitas fiskal, penguatan tata kelola, program *fiscal rescue* jangka pendek, serta *structural reform* agar keluar dari *low growth trap*.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil regresi dan tipologi daerah tersebut maka beberapa rekomendasi strategi kebijakan antara lain;

1. Perlunya merumuskan skema *rebalancing* TKD yang memfokuskan pada *quality spending* dimana DAK Fisik dan DBH pada daerah dengan elastisitas tinggi diarahkan untuk terus menjadi *investment-driven growth (Efficiency Track)*. Sementara itu, dilakukan juga penguatan *Equity Track* TKD utamanya terhadap daerah yang elastisitas rendah dan rentan agar penggunaan DAU dan DAK non fisik mampu menjaga kebutuhan minimal dalam mendorong perbaikan kualitas layanan daerah. Sehingga DAU dan DAK Non Fisik perlu terus diperankan sebagai *performance-based spending* untuk layanan dasar dan penguatan kapasitas manusia, sehingga efeknya lebih produktif dibanding sekadar belanja rutin.
2. Penggunaan variable Resiliensi Daerah yang mempertimbangkan risiko bencana dan kapasitas daerah diperlukan dalam formula pengalokasian TKD agar TKD memiliki resiliensi jangka panjang. Hal ini bertujuan agar daerah dengan risiko bencana tinggi dan kapasitas fiskal rendah memperoleh proteksi fiskal yang lebih memadai, sehingga TKD juga berfungsi sebagai buffer menjaga stabilitas pertumbuhan ketika krisis terjadi. Sebaliknya bagi daerah dengan risiko bencana tinggi dan kapasitas fiskal tinggi, TKD dapat diarahkan untuk mendukung program mitigasi risiko bencana daerah guna meningkatkan resiliensi ekonominya.

Limitasi

1. Periode analisis hanya mencakup 2021–2024, sehingga hasil lebih merefleksikan dinamika jangka pendek pasca-pandemi. Efek jangka panjang TKD terhadap pertumbuhan dan resiliensi mungkin berbeda.
2. Indeks Resiliensi Daerah (IRD) dibangun dari kombinasi risiko bencana dan kapasitas fiskal. Namun resiliensi sebenarnya multidimensional (sosial, kelembagaan, infrastruktur), sehingga IRD di dalam kajian ini hanya sebagian dari gambaran. Bobot dari indeks ini juga disusun dengan pendekatan normatif, ke depan perlu disajikan juga indeks yang disusun dengan pendekatan statistik seperti PCA.
3. Rekomendasi rebalancing TKD berbasis elastisitas perlu diuji lebih lanjut misalnya dengan analisis kualitatif, terutama terkait pengaruh kapasitas kelembagaan daerah dalam mendukung penguatan elastisitas TKD.

- Tim Penyusun : Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah -

